

ANALISIS RETRIBUSI DAERAH DAN SUMBANGANNYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DATI II JEMBER
TAHUN ANGGARAN 1993/1994 - 1998/1999

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Oleh

Djony Subagio
NIM. 9308101145 / SP

Asal	: Hadiah	Klass 336 SUB 100 a
	: Pembelian	
Terima Tgl:	19 MAY 2000	
No, Induk :	PTI. 2000 - 10.132	

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
1999

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS RETRIBUSI DAERAH DAN SUMBANGANNYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DATI II
JEMBER TAHUN ANGGARAN 1993/1994-1998/1999

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : DJONY SUBAGIO

N. I. M. : 9308101145

J u r u s a n : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

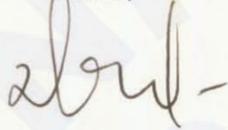
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

14 Oktober 1999

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Dr. H. HARIJONO, SU. Ec

NIP. 130 350 765



Sekretaris,

Drs. RAFAEL PURTOMO, MSi

NIP. 131 793 384

Anggota,

Drs. SONNY SUMARSONO

NIP. 131 759 836

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Drs. H. SUKUSNI, M.Sc

NIP. 130 350 764

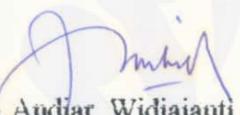
Tanda Persetujuan Skripsi Sarjana Ekonomi

Nama : Djony Subagio
Nomor Induk Mahasiswa : 938101145
Program Studi : S-1
Jurusan : Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Perbankan
Dosen Pembimbing : 1. Dra. Andjar Widjajanti
2. Drs. Sonny Sumarsono

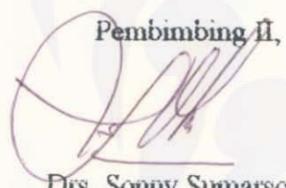
Disahkan di Jember
Pada tanggal : 8 September 1999
Disetujui dan diterima baik oleh

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I,


Dra. Andjar Widjajanti
NIP. 130 605 110

Pembimbing II,


Drs. Sonny Sumarsono
NIP. 131 759 836

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah yang lain dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu berharap."(Al-qur'an Surat Al-Insyiraah ayat ; 5-8)



Persembahan

Karya ini merupakan awal bagi perjuangan hidup saya, dan akan kupersembahkan kepada:

- ◆ Ibunda dan Ayahanda tercinta atas do'a yang selalu terucap sepanjang siang dan malam buat kesuksesanku.
- ◆ Chuyin tersayang yang telah memberikan semua perhatian, kesabaran dan kasih sayangnya kepadaku.
- ◆ Kakak-kakakku tercinta.
- ◆ Rekan-rekan tercinta
- ◆ Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, nikmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan pengarahan yang tak terhingga nilainya dalam penyusunan hingga selesainya skripsi yang berjudul **Analisis Retribusi Daerah dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Dati II Jember Tahun 1993/1994-1998/1999**.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Sehubungan dengan selesainya karya akhir ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

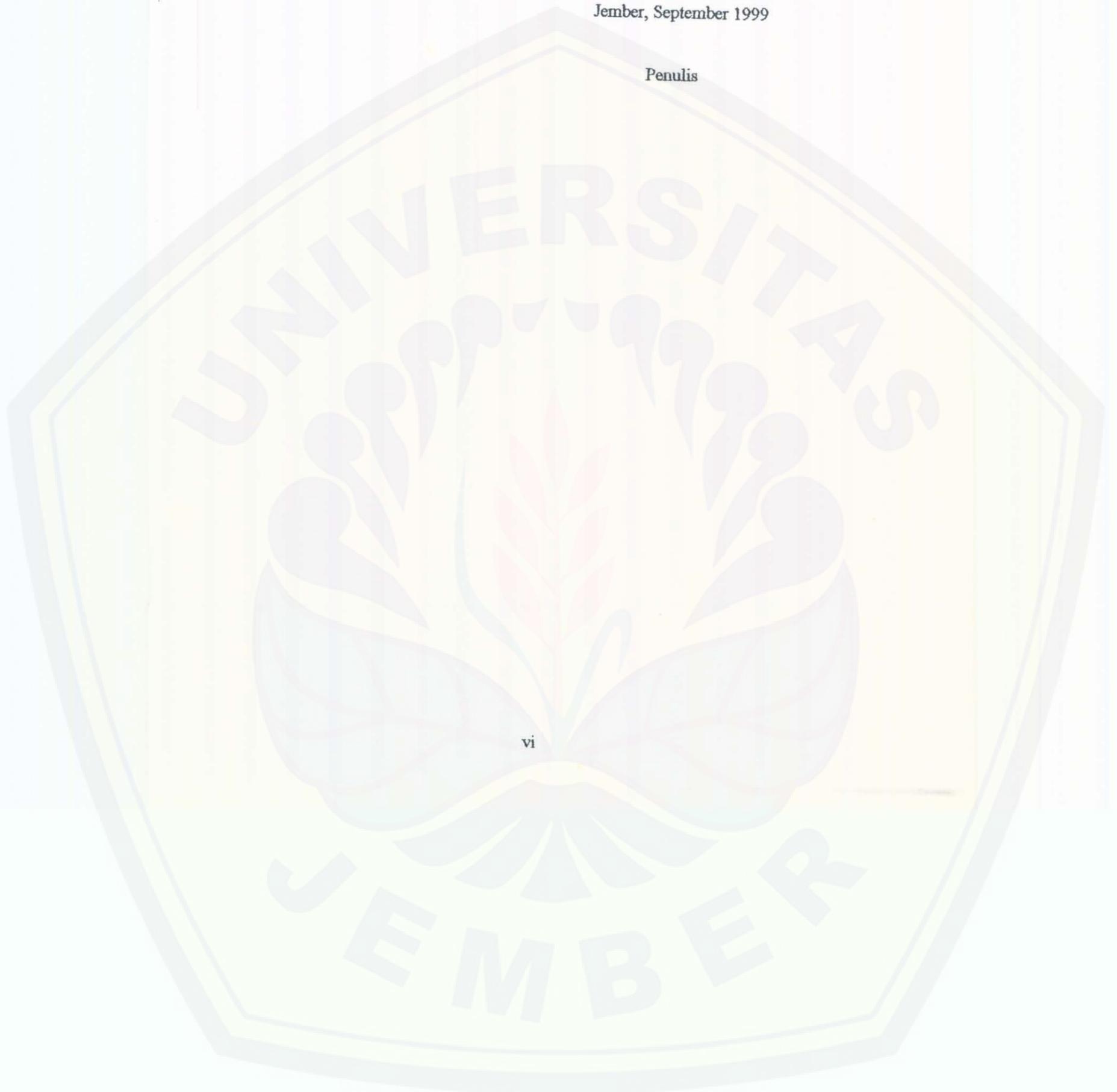
1. Bapak Dra. Andjar Widjajanti dan Bapak Drs. Sonny Sumarsono sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Bapak Pimpinan Kantor Dipenda Kabupaten Dati II Jember beserta staf yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam penelitian ini;
5. Ibunda tercinta dan Ayahanda serta kakak-kakakku tersayang yang selalu berdo'a buat saya.
6. Chuyin tersayang yang telah mencurahkan waktu dan fikiran untuk penulis.
7. Keluarga di Mojokerto yang telah memberikan semangat bagi penulis.

Tidak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga Bondowoso yang telah menjadi bagian hidup saya selama di Jember serta buat sahabat-sahabat terdekatku Iman Isnanto, Cak Damar, Charles, Boyong, Andi, Teten, Wiwin, Atik, Maria dan teman-teman semua warga SP/GIP '93 atas kebersamaanya selama ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, September 1999

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Hipotesis.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Metode Analisa Data.....	7
1.7 Definisi Operasional.....	8
II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN DATI II JEMBER.....	10
2.1 Keadaan Ekonomi.....	10
2.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember.....	11
2.3 Retribusi Daerah Kabupaten Dati II Jember.....	13

III. LANDASAN TEORI	15
3.1 Keuangan Daerah.....	15
3.2 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.....	17
3.3 Sumber-sumber Penerimaan daerah.....	18
3.4 Retribusi Daerah.....	20
IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Analisis Sumabngan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	29
4.2 Analisis Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah di Tahun-tahun Yang Akan Datang.....	31
4.3 Pembahasan.....	32
V. SIMPULAN DAN SARAN	36
5.1 Simpulan.....	36
5.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perkembangan PDRB Kabupaten Dati II Jember Tahun 1997	10
Tabel 2.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember Tahun Anggaran 1993/1994-1998/1999	12
Tabel 3.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Dati II Jember Tahun Anggaran 1993/1994-1998/1999	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Tren Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Dati II Jember Tahun Anggaran 1993/1994-1998/1999 45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Proporsi Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Laba Perusahaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember Tahun 1993/1994-1998/1999	40
Lampiran II.	Perhitungan Retribusi Daerah Terhadap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember Tahun 1993/1994-1998/1999.....	41
Lampiran III.	Tren Penerimaan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember Tahun 1993/1994-1998/1997	42
Lampiran IV.	Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Dati II Jember Tahun 1993/1994-1998/1999 (dalam rupiah)	43
Lampiran V.	Tabel Prospek Penerimaan Retribusi Daerah di kabupaten Daerah Tingkat II Jember tahun 1999/2000-2002/2003	44

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata materiil dan spirituil, berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Usaha untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional telah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, yaitu Pelita. Secara keseluruhan sejak dimulainya Pelita I sampai sekarang Indonesia telah banyak mencapai kemajuan dalam sejarah pertumbuhan pembangunan di segala bidang.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan adanya dana dalam jumlah yang cukup besar. Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan aktivitas secara keseluruhan tidak terlepas dari peran serta daerah dalam ikut serta mewujudkan tujuan pembangunan, sebab pembangunan daerah secara utuh dan terpadu merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional. Kemampuan daerah untuk dapat memacu pembangunan ekonomi daerahnya mempunyai pengaruh yang positif bagi tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya diseluruh pelosok tanah air, sehingga dapat diciptakan keadilan sosial serta terpeliharanya stabilitas daerah tersebut. Untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masalah dan pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah daerah di negara kita dibagi ke dalam dua tingkat, yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pembagian daerah tersebut diatur

dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Kemandirian daerah kini merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi mengingat dalam era globalisasi perdagangan bebas nanti, setiap daerah diharapkan mampu bersaing dengan daerah lain yang tersebar di seluruh belahan dunia, terutama dalam hal menarik sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Namun, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri pembangunan daerah masih sering menghadapi kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).

Dalam menjalankan kegiatan pembangunan, pemerintah membutuhkan pembiayaan baik yang berasal dari penerimaan rutin maupun penerimaan pembangunan. Dimana penerimaan pajak meliputi penerimaan pajak langsung dan pajak tak langsung, sedangkan penerimaan non pajak meliputi penerimaan dari perusahaan-perusahaan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan untuk berbagai kegiatan usaha (Bintoro Tjokroamidjojo, 1991 :154).

Menurut pasal 3 Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber penerimaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut ; A. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang terdiri dari : 1). Hasil Pajak Daerah, 2). Hasil Retribusi Daerah, 3). Hasil Perusahaan Daerah, 4). Lain-lain usaha daerah yang sah. B. Dana Perimbangan, C. Pinjaman Daerah, D. Lain-lain Penerimaan yang sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan yang tidak dapat terlepas dari

kenyataan-kenyataan secara potensiil yang ada pada daerah yang bersangkutan, juga ditentukan pula oleh kondisi dari daerah tersebut.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan faktor dominan, adalah retribusi daerah. Sumber ini ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Dati II Jember memungut bayaran untuk layanan yang disediakan. Juga memungut bayaran untuk berbagai surat ijin, berbagai formulir, dan sebagainya. Sebagian besar pendapatan ini digolongkan ke dalam pungutan (Retribusi).

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan (secara ekonomi) dengan suatu jasa balik langsung yang dapat ditunjuk. Retribusi ini berbeda dengan pajak dalam hal imbalan jasa retribusi dipungut karena seseorang telah memanfaatkan atau menerima jasa dari pemerintah, sedangkan pajak dipungut tanpa adanya jasa dari pemerintah kepada si pembayar secara langsung. Pemaksaan pada retribusi bersifat ekonomis, karena siapa saja dapat tidak membayar retribusi, dengan tidak atau menolak untuk menikmati jasa balik tersebut. Pungutan tersebut dapat berupa misalnya, uang parkir, Retribusi pasar, Retribusi sampah, uang sekolah dan sebagainya.

Bagi Dati II khususnya dalam hal ini adalah Kabupaten Jember, penerimaan dari retribusi daerah ini merupakan faktor yang dominan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini misalnya dapat terlihat pada realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Dati II Jember pada tahun 1991/1992, dimana pada sektor retribusi daerah mencapai 4,3 milyar dan meningkat pada

tahun 1992/1993 sebesar 4,7 milyar, sedangkan pajak daerah mencapai 7,92 juta, pada tahun 1992/1993 menjadi 8,48 juta dan Laba BUMN mencapai 2,28 juta, meningkat pada tahun 1992/1993 menjadi 4,04 juta. Pada tahun 1994/1995 kontribusi retribusi daerah tetap menunjukkan adanya peningkatan dan memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah yang lainnya yaitu sebesar 5,1 milyar dan pada tahun berikutnya menjadi 5,7 milyar, sedangkan pajak daerah dan laba BUMN masing-masing sebesar 2,2 milyar dan 5,22 juta, pada tahun berikutnya meningkat menjadi masing-masing 2,8 milyar dan 1,03 milyar.

Selaras dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Dati II Jember diberbagai bidang, hal ini tentu pemerintah daerah memerlukan dana yang lebih besar lagi. Sehingga persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya dengan mengandalkan kemampuan sendiri melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali sumber-sumber pembiayaan yang ada di wilayah Kabupaten Dati II Jember, diantaranya adalah retribusi daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan, sehingga menarik sekali untuk membahas sumbangan retribusi daerah dalam pembentukan pendapatan asli daerah di Dati II Jember selama tahun anggaran 1993/1994 - 1998/1999.



1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :

1. seberapa besar sumbangan retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Dati II Jember tahun 1993/1994 - 1998/1999;
2. bagaimana prospek penerimaan retribusi daerah pada tahun-tahun mendatang di Kabupaten Dati II Jember sampai tahun 2002/2003.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Dati II Jember selama tahun 1993/1994-1998/1999;
2. untuk mengetahui prospek penerimaan retribusi daerah sampai tahun 2002/2003.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. sebagai bahan pertimbangan didalam menentukan kebijakan dan langkah dimasa mendatang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya dan retribusi daerah pada khususnya;
2. sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian dalam masalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

1.4 Hipotesa Penelitian

Dari permasalahan penelitian tersebut diatas dapat ditarik suatu hipotesa bahwa selama tahun anggaran 1993/1994-1998/1999 sumbangan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Dati II Jember lebih besar jika dibandingkan dengan komponen pendapatan asli daerah lainnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Daerah Penelitian

Daerah penelitian dipilih secara sengaja (purposive) di Kabupaten Dati II Jember. Alasan pemilihan daerah penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa kontribusi Kabupaten Dati II Jember terhadap penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur menempati urutan ketiga serta adanya tuntutan Undang-Undang NO. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan semua Kota Administratif dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom, jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka kota tersebut dapat dihapus. Sehingga Kabupaten Dati II Jember mempunyai tugas yang cukup berat untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya sesuai dengan potensi yang ada. Sumber penerimaan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber penerimaan. Salah satu dari sekian banyak sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang sangat potensiil untuk dikembangkan adalah penerimaan retribusi daerah.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari Kantor Dispenda Kabupaten Dati II Jember, Kantor Bappeda serta lembaga-lembaga atau instansi terkait, serta dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

1.6 Metode Analisa Data

Untuk mengetahui besarnya sumbangan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka digunakan analisis proporsi (Djarwanto, 1982:129) :

$$P_i = \frac{Y_i}{X_i} \times 100\%$$

dimana :

P_i = Nilai Proporsi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD

Y_i = Penerimaan retribusi daerah tiap tahun

X_i = PAD tiap tahun

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan atau prospek penerimaan retribusi daerah di tahun-tahun mendatang digunakan rumus metode analisa kuadrat terkecil (Least Square Method) (Anto Dajan, 1985:303) :

$$Y' = a + bX$$

dimana :

Y' = Nilai tren retribusi daerah yang ditaksir

a = Nilai tren retribusi pada periode dasar

b = Pertambahan tren tiap tahun retribusi daerah

x = Periode waktu

Untuk memperoleh nilai a dan b dengan cara :

$$a = \frac{\sum y}{n} \qquad b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

dimana :

$\sum y$ = Jumlah penerimaan retribusi daerah tiap i (tahun)

n = Jangka waktu penerimaan

x = Skala waktu

1.7 Definisi Operasional

Untuk memperjelas pengertian yang ada dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Jember sehubungan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada masyarakat selama periode tahun anggaran 1993/1994-1998/1999 per tahun dalam rupiah;

2. pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah di Kabupaten Dati II Jember yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan dan usaha usaha daerah lain yang sah selama periode tahun anggaran 1993/1994-1998/1999 per tahun dalam rupiah.



II. GAMBARAN UMUM DAERAH TINGKAT II JEMBER

2.1 Keadaan Ekonomi

Keadaan perekonomian Kabupaten Dati II Jember secara keseluruhan tercermin dari PDRB yaitu jumlah atau seluruh nilai tambah produk barang dan jasa yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan di suatu daerah (region) tertentu tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi. Sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Jember antara lain sektor pertanian, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dati II Jember dapat dilihat dari perkembangan PDRB nya. Berikut tabel perkembangan PDRB dalam 5 tahun terakhir ini :

Tabel 1. Perkembangan PDRB Kabupaten Dati II Jember Tahun 1993 - 1997

Tahun	PDRB (jutaan rupiah)	Pertumbuhan (%)
1993	1.696.849,48	-
1994	1.838.604,18	8,35
1995	1.996.764,71	8,60
1996	2.170.699,24	8,71
1997	2.269.330,62	4,54

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Dati II Jember, 1998

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun PDRB Jember selalu mengalami peningkatan, ini berarti keadaan ekonomi bisa dikatakan sudah baik sehingga perkembangan penduduknya dapat dikatakan baik pula, karena dengan perkembangan ekonomi yang baik maka penduduknya dapat dikatakan baik pula.

Keberhasilan Jember dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut di atas, disebabkan kesungguhan Jember dalam melaksanakan pembangunan, terutama dalam meningkatkan ekspor non migas. Sektor-sektor perekonomian yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada tahun 1996 adalah sektor pertanian, sektor gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Dalam menghimpun perbankan seperti Giro dan tabungan tampak bahwa bank-bank pemerintah mengungguli bank swasta. Hal ini terlihat pada nilai nominal Giro dan tabungan pada bank pemerintah masing-masing Rp. 122.938 juta dan Rp.793.656 juta. Sedangkan pada bank swasta masing-masing Rp. 55.382 juta dan Rp. 191.942 juta. Sedangkan untuk deposito, bank swasta lebih dinikmati oleh masyarakat dibanding bank pemerintah dengan nominal Rp. 202.982 juta sedangkan bank pemerintah sebesar Rp.133.320 juta.

2.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerah sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dati II Jember menunjukkan angka yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Untuk mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember dapat dilihat dari tabel 2.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember Selama Tahun Anggaran 1993/1994-1998/1999

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1993/1994	7.182.732.000	6.569.580.093	91,46
1994/1995	7.694.588.063	8.110.296.839	105,40
1995/1996	10.281.121.419	10.707.220.059	104,14
1996/1997	14.909.142.098	15.048.072.697	100,93
1997/1998	14.201.096.581	14.017.304.759	98,70
1998/1999	15.983.918.160	20.141.358.584	126,01

Sumber: Kantor Dispenda Kabupaten Dati II Jember, 1998

Dari tabel diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Antara target dan realisasinya rata-rata hampir selaras. Hanya pada tahun anggaran 1993/1994 antara target dengan realisasi lebih kecil, dimana target sebesar Rp 7.182.732.000,- tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp 6.569.580.093,-. Hal ini di akibatkan adanya penurunan penerimaan dari pos Bagian Laba Usaha Daerah yang tidak memenuhi target yaitu sebesar Rp 522.150.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 520.455.000,-. Dan juga pada pos penerimaan lain-lain yang juga tidak memenuhi target yang diharapkan yaitu dari target sebesar Rp 199.000.000,- hanya dapat dicapai 198.250.319,-.

Tetapi selama tahun anggaran 1993/1994 sampai 1998/1999 penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Jember cenderung mengalami peningkatan.

2.3 Retribusi Daerah Kabupaten Dati II Jember

Pemerintah memungut bayaran atas jasa atau pelayanan yang diberikan ke masyarakat, dimana pungutan ini dimasukkan ke dalam Retribusi. Retribusi ini merupakan salah satu komponen pembentukan Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting dan potensiil untuk dikembangkan.

Penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Dati II Jember dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan masih memberikan kontribusi yang besar dibandingkan komponen-komponen pembentukan Pendapatan Asli Daerah yang lainnya seperti pajak daerah dan laba usaha daerah. Peningkatan ini dapat dilihat selama periode tahun anggaran tahun 1993/1994-1998/1999 pada tabel 8 berikut ini :

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Dati II Jember

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
1993/1994	4.948.332.490	4.492.022.985	90,78
1994/1995	4.979.332.000	5.118.865.222	102,80
1995/1996	5.671.070.499	5.785.151.869	102,01
1996/1997	6.356.800.000	6.124.769.215	96,35
1997/1998	7.611.423.350	6.967.387.104	91,54
1998/1999	9.338.952.999	9.241.855.614	98,96

Sumber : Kantor Dispenda Kabupaten Dati II Jember,1998

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Dati II Jember cenderung untuk meningkat. Demikian pula antara target dan realisasi rata-rata terpenuhi bahkan cenderung lebih besar dengan prosentasi rata-rata sebesar 97,07 %. Pada tahun anggaran 1993/1994 antara target dan realisasi tidak sesuai yang diharapkan, dimana Realisasinya hanya sebesar Rp4.948.332.490,- lebih kecil dibandingkan targetnya yaitu sebesar

Rp 4.992.022.985,-. Dan hal ini juga terjadi pada tahun 1997/1998 yang antara target dan realisasi tidak sama yang hal ini diakibatkan berkurangnya penerimaan dari pos-pos yang ada pada penerimaan retribusi daerah.

Tetapi dilihat dari penerimaan tiap tahunnya retribusi daerah di Kabupaten Dati II Jember mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya usaha-usaha dari pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi dengan melakukan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi serta adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.



III. LANDASAN TEORI

3.1 Keuangan Daerah

Kegiatan pembangunan Nasional tidak terlepas dari peran selirih masyarakat yang ada dan kemampuan daerah dalam pembangunan daerah tersebut. Dalam upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut lebih mandiri untuk membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan PAD yang positif di sisi penerimaan dan peranannya dari tahun ke tahun. PAD hanya merupakan bagian dari salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan di samping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak atau bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta pinjaman daerah.

Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan ini penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.....Dan keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara

nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (S. Pamudji, 1980:61).

Mengenai penerimaan keuangan daerah dapat dikemukakan antara lain sumber-sumbernya sebagai berikut (Tjokroamidjojo, 1991:161):

1. dari pendapatan dan melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang yang bukan menjadi wewenang pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah;
2. penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, seperti misalnya retribusi, tarif perijinan tertentu dan lain-lain;
3. pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan-perusahaan daerah, yaitu perusahaan-perusahaan yang mendapatkan modal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah;
4. penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, dengan ini dimaksudkan sebagai bagian penerimaan tertentu daripada pajak-pajak yang dipungut pemerintah pusat dan kemudian diserahkan pada daerah;
5. pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung, yang penggunaannya ditentukan untuk daerah;
6. pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat khusus karena keadaan-keadaan tertentu;
7. penerimaan-penerimaan-penerimaan daerah yang di dapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

Hasil-hasil dari penerimaan ini dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan-keperluan pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan dari pemerintah daerah tersebut.

3.2 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Maksud daripada hubungan ini adalah hubungan kerja antara dua pihak, instansi, pejabat dan sebagainya. Jadi maksud kaitan antara pusat dan daerah ialah hubungan atau kaitan tugas atau pertalian antara perangkat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adanya pemerintah daerah ini memungkinkan sebagai akibat sistem pemerintah yang desentralisasikan. Dalam hal ini perangkat daerah akan melaksanakan urusan-urusan pusat yang telah diserahkan menjadi urusan daerah sendiri (Irawan, 1990:69).

Hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut pembagian. Hubungan ini menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan itu. Tujuan utama hubungan ini ialah mencapai perimbangan antara berbagai pembagian ini yaitu bagaimana agar antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai. Hubungan keuangan ini mencerminkan tujuan politik uang mendasar sekali karena peranannya dalam keseluruhan sistem pemerintah. Hubungan ini harus sesuai dengan peranan yang dimainkan pemerintah daerah. (Devas, 1988:179).

Ada 4 hal yang perlu diperhatikan suatu sistem hubungan pusat dan daerah harus menjamin adanya (Devas, 1988:22):

- a) suatu pembagian kekuasaan yang rasional tingkat-tingkat pemerintah dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pembangunan, yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi;
- b) suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dan keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- c) pembagian yang adalah diantara daerah-daerah atas pengeluaran pemerintah, atau sekurang-kurangnya ada perkembangan yang memang diusahakan akan ke arah itu;
- d) suatu upaya perpajakan didalam memungut pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan pembagian yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran dalam masyarakat.

3.3 Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, bagi pemerintah daerah mutlak diperlukan sumber pembiayaan dalam bentuk uang yang sedikit jumlahnya, untuk menutupi pengeluaran dalam memenuhi kebutuhannya. Pemerintah daerah dalam hal ini harus dapat menggali sumber-sumber PAD sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan upaya memperkuat otonomi daerah atau peningkatan PAD, maka bantuan dari pemerintah pusat

sesungguhnya merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu peningkatan PAD, dan bukan sebaliknya. Hal ini ditekankan oleh Nurjaman Arsjad bahwa hakekat bantuan atau subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah, karena itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak positif terhadap peningkatan PAD. Dengan kata lain, adanya kebebasan dalam menggunakan subsidi dari pemerintah pusat menetapkan daerah betul-betul dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong peningkatan PAD-nya (Nurjaman, 1990:44).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang benar-benar diperoleh dan dipergunakan oleh daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. PAD menunjukkan kualitas suatu daerah dalam kemandiriannya untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Semakin besar penerimaan PAD, berarti pula bahwa kemampuan dalam melaksanakan pembangunan akan lebih baik, dan semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka bisa dikatakan daerah itu semakin mandiri.

Menurut pasal 3 UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sumber penerimaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut :

A. PAD terdiri dari :

- 1). Hasil Pajak Daerah ;
- 2). Retribusi Daerah ;
- 3). Hasil perusahaan Daerah;
- 4). Lain-lain usaha yang sah.

B. Dana Perimbangan



i
y
d
ti
al
m
a)
b)
c)
d)
r

Retribusi mempunyai beberapa asas yaitu (Sutrisno,1982 :120):

1. Asas Politik Finansiil
 - a. penarikan retribusi hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan memadai;
 - b. penarikan retribusi hendaknya bersifat dinamis.
2. Asas Ekonomi
 - a. pemilihan retribusi yang tepat;
 - b. pemilihan macam-macam penarikan retribusi, mengingat adanya berbagai sektor yang dapat dikenakan pungutan.
3. Asas Keadilan
 - a. pungutan bersifat umum;
 - b. kesamaan beban.
4. Asas Administratif
 - a. kapasitas penarikan;
 - b. keluwesan dalam pemungutan;
 - c. ongkos, pemungutan hendaknya di sahakan sekecil mungkin.

3.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian dari retribusi daerah, dalam pasal 32 UU. No.22 tahun 1948 yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, ditegaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan pendapatan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) diensten yang diberikan oleh daerah kepada siapa saja yang membutuhkan diensten tersebut.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Umum Retrisbusi Daerah (UU. Drt. No.12 tahun 1957) disebutkan bahwa yang dimaksud

dengan retribusi daerah adalah pungutan dari pemerintah daerah sebagai pembayaran pemakaian atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3.4.2 Ciri-ciri Retribusi Daerah

Melihat beberapa pengertian retribusi daerah dapatlah diambil ciri pokok retribusi daerah yaitu sebagai berikut :

- a) retribusi dipungut oleh pemerintah daerah;
- b) dalam pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c) retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan pemerintah daerah.

3.4.3 Macam-macam Retribusi

Dalam pasal 8 Undang-Undang No.12 Tahun 1957 disebutkan adanya 6 jenis retribusi yang dapat dipungut daerah yaitu : uang leges, uang tol/bea jalan, bea pangkalan, dan bea penambangan, bea pembatalan dan pemeriksaan, uang sempadan dan izin bangunan, retribusi atas pemakaian tanah dan bea pengukuran.

Dalam perkembangannya jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut, untuk Daerah Tingkat I adalah (Hadi Setia Tunggal, 1999:199) :

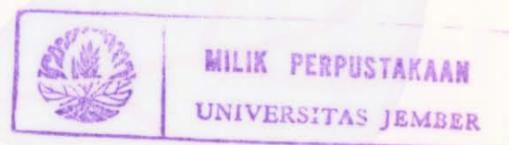
1. retribusi atas pengusahaan tambak ikan di tepi pantai;
2. retribusi atas izin pengambilan kerikil, pasir dan batu kapur;
3. retribusi atas pengambilan dan pembakaran kapur gamping;

4. retribusi atas pengelolaan bahan galian golongan c;
5. retribusi pengujian mutu hasil perikanan;
6. retribusi leges;
7. retribusi atas dispensasi kelas jalan;
8. retribusi tempat pelelangan ikan;
9. retribusi penyelenggaraan balai benih ikan dan udang milik pemda;
10. retribusi iuran pertambangan rakyat untuk galian emas;
11. retribusi perijinan pariwisata;
12. retribusi hasil hutan dan laut;
13. retribusi air bawah dan air permukaan;
14. retribusi penerimaan sertifikat prakualifikasi dan daftar rekanan mampu;
15. retribusi pungutan atas dokumen lelang;
16. retribusi penimbunan/penyimpanan bahan bakar.

sedangkan untuk daerah tingkat II retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. retribusi leges;
2. retribusi pemberian ijin perindustrian kecil;
3. retribusi penertiban pengeluaran ternak keluar daerah;
4. retribusi pemeriksaan hasil bumi;
5. retribusi pengawasan/pengeluaran hasil ternak/unggas keluar daerah;
6. retribusi pencegahan/pemberantasan ternak terhadap penyakit ngorok dan vaksinasi;
7. retribusi ijin usaha hotel;
8. retribusi pembenihan ikan hias dan udang;
9. retribusi pemberian ijin menangkap ikan;

10. retribusi jasa fasilitas langsung;
11. retribusi penyelenggaraan perfilman;
12. retribusi wajib uji barang;
13. retribusi jasa fasilitas sungai/dermaga;
14. retribusi pemeriksaan susu;
15. retribusi kartu keluarga;
16. retribusi pemberian nomor rumah;
17. retribusi lisensi ulang;
18. retribusi penitipan sepeda;
19. retribusi tempat usaha;
20. retribusi pengambilan sarang burung walet;
21. retribusi ijin menutup selokan;
22. retribusi ijin depot obat;
23. retribusi rumah makan;
24. retribusi penerimaan timbangan ternak;
25. retribusi pengelolaan bambu;
26. retribusi tempat pedagang kaki lima;
27. retribusi penjualan benih anjing keturunan asing;
28. retribusi pemberantasan hama tanaman;
29. retribusi pencucian kendaraan bermotor;
30. retribusi sewa kandang babi;
31. retribusi atas pembelian klembak;
32. retribusi saluran riol;
33. retribusi ijin pengangkutan barang;
34. retribusi kendaraan bermotor;
35. retribusi angkutan tebu giling;
36. retribusi sewa teratag;
37. retribusi pembenihan ikan hias;



38. retribusi ijin pembuatan gula kelapa.

3.4.4 Kriteria Penerimaan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Asli Daerah

Retribusi diartikan sebagai suatu pembangunan yang dikaitkan langsung dengan pelayanan dan dikenakan berdasarkan pemikiran bahwa penyediaan pelayanan tertentu tidak mungkin diberikan untuk semua orang dimana keperluan seseorang berbeda-beda dan menyangkut soal kepemilikan.

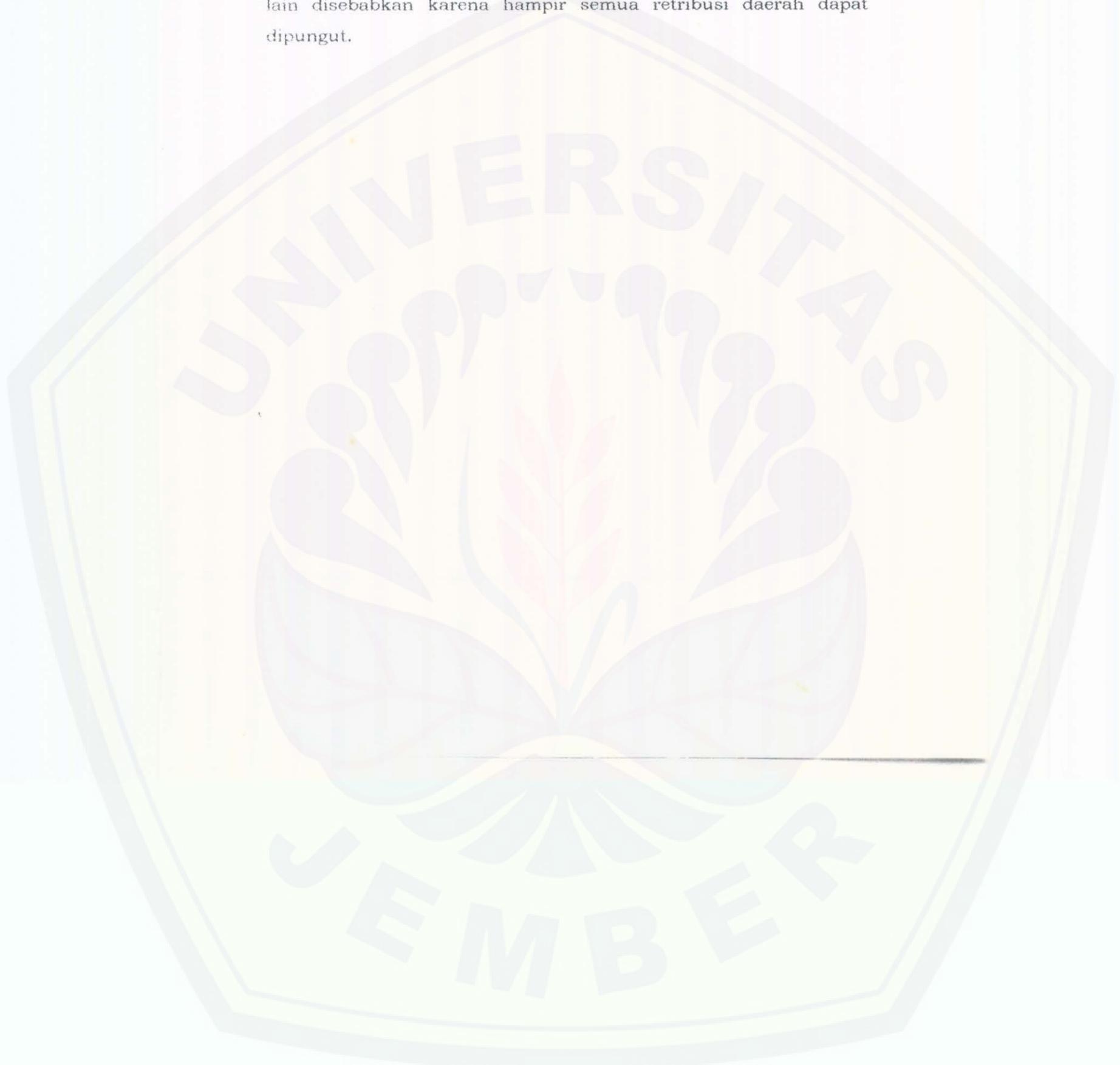
Sedangkan penilaian retribusi dari kriteria umum adalah (Hamdani Amin, 1982:15):

1. kriteria kecukupan elastisitas
retribusi responsif terhadap penambahan penduduk dan kenaikan pendapatan. retribusi cenderung tidak dapat menyesuaikan dengan inflasi karena adanya hambatan tarif.
2. kriteria pemerataan keadilan
retribusi secara tradisional bersifat regresif.
3. kriteria kemampuan administrasi
retribusi secara teoritis mudah dikenakan dan dipungut tapi dalam praktek tidak selamanya demikian.
4. kriteria penerimaan publik
retribusi yang menyangkut unsur pilihan dapat dianggap tidak begitu sensitif, tetapi bagi kebutuhan politik biasanya sensitif.
5. kriteria ekonomi
retribusi merupakan alat untuk alokasi sumber yang baik.

6. kriteria administrasi daerah.

retribusi merupakan sumber yang dapat bersifat daerah, jadi secara administrasi daerah lebih tepat. Tetapi kesulitan atau hambatannya adalah pada penyesuaian tarif, pengawasan dan sanksi.

Bagi daerah tingkat II, retribusi selalu merupakan sumber utama. Tingginya pendapatan daerah dari sektor retribusi antara lain disebabkan karena hampir semua retribusi daerah dapat dipungut.



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Guna mensukseskan pembangunan di daerah, perlu adanya usaha-usaha yang dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan yang diselenggarakan di daerah itu sendiri, dalam hal ini pemerintah daerah harus mampu menghimpun sumber-sumber keuangan yang bersumber dari daerah itu sendiri atau yang merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola dari sumber keuangan daerah sendiri. Pemanfaatan pengelolaan potensi-potensi keuangan asli daerah harus benar-benar dijalankan secara efektif dan efisien. Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah, sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi daerah, semakin besar jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya, semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk berkembang dan membangun daerahnya menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sumber pendapatan daerah yang ideal adalah sumber pendapatan yang bersifat ajeg dan selalu mengalami kenaikan. Ajeg dalam arti selalu dapat diharapkan masuk ke daerah atau negara. Hal ini penting sekali karena pengeluaran daerah untuk keperluan pembiayaan pembangunan adalah bersifat kontinue dan selalu mengalami peningkatan.

Di Kabupaten Dati II Jember, Pendapatan Asli Daerah sangat diharapkan menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah

dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah, maka berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah tersebut.

Komponen -komponen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Jember, terdiri dari :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Laba Perusahaan Daerah;
4. Penerimaan dari Dinas-dinas;
5. Penerimaan Lain-lain.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Dati II Jember, terlihat bahwa sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah terdapat 13 macam. Dari 13 macam pajak Daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kabupaten Dati II Jember, yang berpotensi ada empat macam Pajak Daerah berturut-turut yaitu : Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pertunjukan dan Keramaian, Pajak Reklame, Pajak Pembangunan I.

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah Terdiri dari 24 macam Retribusi Daerah. Dari macam-macam Retribusi Daerah terdapat empat macam Retribusi Daerah yang paling potensiil yaitu berturut-turut :Retribusi Fumah Sakit, Retribusi Pasar, Retribusi Parkir,Retribusi Kebersihan. Sumber Pendapatan Daerah dari sektor-sektor yang lain, yaitu Laba Perusahaan, Penerimaan Dinas-dinas serta Penerimaan Lain-lain mempunyai andil yang patut diperhitungkan meskipun peranannya tidak sebesar yang disumbangkan Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Lampiran V terlihat bahwa penerimaan Retribusi Daerah lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat Potensiil.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Retribusi Daerah di Kabupaten Dati II Jember akan dibahas sebagai berikut :

1. sumbangan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Jember tahun anggaran 1993/1994-1998/1999;
2. prospek penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Dati II Jember sampai tahun 2002.

4.1 Analisis Sumbangan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Jember digunakan rumus proporsi (Djarwanto, 1982:129):

$$P_i = \frac{Y_i}{X_i} \times 100 \%$$

Proporsi ini diperoleh dengan membandingkan antara retribusi daerah dengan Pendapatan Kabupaten Dati II Jember untuk tiap tahunnya selama periode tahun anggaran 1993/1994-1998/1999 dikalikan dengan seratus persen.

Untuk mengetahui besarnya proporsi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Jember selama periode tersebut diatas, dapat dilihat pada lampiran II. Proporsi yang diberikan oleh penerimaan retribusi daerah berfluktuasi antara 54,70% sampai 48,40%. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 1993/1994 dimana pada tahun tersebut besarnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 6.596.580.093,- dan penerimaan dari retribusi daerah adalah sebesar Rp 4.492.022.986,- sehingga proporsi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 68,38%. Sedangkan proporsi terendah terjadi pada tahun anggaran 1996/1997 dimana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 15.048.027.697,- dan penerimaan dari retribusi daerah sebesar Rp 6.124.769.215,- sehingga proporsi yang diperoleh dari penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 40,70%. Tinggi-rendahnya proporsi disebabkan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pungutan atau retribusi ini serta semakin pesatnya kenaikan penerimaan dari komponen Pendapata Asli Daerah yang lainnya.

Sedangkan proporsi rata-rata dari penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Jember Ini selama periode enam tahun anggaran tersebut sebesar 54,06%. Meskipun proporsi penerimaan retribusi daerah ini berfluktuasi, tetapi penerimaan dari pos ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup pesat.

4.2 Analisis Perkembangan Penerimaan Retribusi di Tahun-tahun Yang Akan Datang

Peranan penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Jember sangat besar jika dibandingkan dengan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu kiranya untuk mengetahui perkiraan retribusi daerah di tahun-tahun yang akan datang. Meskipun perkiraan ini tidak mutlak kebenarannya, namun dengan perkiraan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya target penerimaan retribusi daerah untuk tahun anggaran yang akan datang.

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui perkembangan penerimaan retribusi daerah di tahun-tahun yang akan datang dengan rumus metode analisa kuadrat terkecil (least square method) (Anto Dajan, 1988:303) :

$$Y = a + bX$$

Berdasarkan perhitungan pada lampiran III, diperoleh persamaan Trend Linier dari penerimaan retribusi daerah sebagai berikut:

$$Y = 6.289.175.335 + 423.790.659X$$

Dengan demikian dapat diketahui pada periode dasarnya sebesar 6.289.175.335 sedangkan besarnya tambahan tren tiap tahun adalah 423.790.659.

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diperkirakan penerimaan retribusi daerah untuk jangka waktu 4 tahun yang akan datang. Berdasarkan perhitungan analisis tren sebagaimana

lampiran III, tren penerimaan retribusi daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan. Begitu juga untuk perkiraan empat tahun yang akan datang. Pada periode tahun anggaran 1999/2000 diperkirakan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 9.255.709.948,-. Hal ini menunjukkan retribusi daerah mempunyai potensi untuk berkembang di tahun-tahun yang akan datang.

Pada Lampiran dapat diketahui bahwa proses penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Dati II Jember untuk empat tahun mendatang yaitu tahun anggaran 1999/2000 - 2002/2003, mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Hal ini memberikan gambaran, bahwa untuk tahun-tahun yang akan datang penerimaan Retribusi Daerah masih tetap dapat diandalkan sebagai penopang keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Dati II Jember.

4.3 Pembahasan

Retribusi merupakan pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara (R. Sumitro, 1979;17). Pengertian lain menyatakan bahwa retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomi, karena siapa saja yang tidak menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah, maka tidak akan dikenakan iuran (S. Munawir, 1980:4).

Berdasarkan angka-angka hasil penelitian ternyata bahwa peranan penerimaan retribusi daerah selama periode penelitian di Kabupaten Dati II Jember sangat penting dan dominan dalam menyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Suatu hal yang

berefek negatif terhadap tingkat penerimaan Retribusi Daerah sudah barang tentu berefek negatif pula terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah .

Pada dasarnya adanya kebijaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang retribusi dinilai wajar mengingat semakin hari tugas dan kewajiban pemerintah juga semakin besar, sudah barang tentu dana yang dibutuhkan semakin besar pula. Pada akhirnya segala langkah kebijaksanaan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Usaha Intensifikasi yang mungkin dapat dilakukan antara lain penyesuaian tarif agar sesuai dengan keadaan dan potensi yang ada di Kabupaten Dati II Jember, mengefektifkan pemungutan retribusi daerah, penertiban administrasi, pencegahan sedini mungkin kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi terhadap penerimaan retribusi daerah, dan lain sebagainya.

Sedangkan Usaha Ekstensifikasi retribusi adalah merupakan suatu usaha memperluas atau memperbanyak obyek-obyek yang dikenakan pungutan ini. Ekstensifikasi ini salah satunya adalah melakukan pengembangan fasilitas atau pelayanan, jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.

Kalau melihat dari rata-rata dari proporsi yang diberikan oleh penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Dati II Jember yaitu sebesar 54,06 % tiap tahun, dapat dikatakan bahwa retribusi daerah di daerah ini memang cukup besar dan memberikan kontribusi yang cukup besar pula terhadap Pendapatan Asli daerah dibandingkan dengan yang lain. Hal ini dapat dimaklumi, karena dari daerah ini potensi dan obyek pungutan sangat banyak. Namun demikian, dengan banyaknya macam pungutan atau retribusi yang bisa ditarik

tidak menjamin proporsi terhadap Pendapatan asli daerah di daerah ini secara otomatis akan naik pula. Ini dapat terlihat dengan adanya fluktuasi proporsi selama periode anggaran tahun 1993/1999-1998/1999 dimana fluktuasi ini terjadi antara 54,05% sampai 48,40%. Hal ini dikarenakan adanya biaya operasional yang tidak memadai dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkan retribusi tertentu. Untuk itu dalam menentukan obyek retribusi daerah perlu juga dipertimbangkan faktor efektivitas dan efisien dalam pemungutannya. Agar penerima yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 1993/1994 yaitu sebesar 68,38%. hal ini diakibatkan adanya pos-pos penerimaan retribusi yang melebihi target yang cukup besar seperti pada penerimaan laba perusahaan daerah, sektor rumah sakit, pasar. Sedangkan proporsi yang terendah pada periode tersebut terjadi pada tahun anggaran 1996/1997 yaitu sebesar 40,70% (Lampiran I). Hal ini disebabkan adanya target yang tidak terpenuhi dari beberapa pos-pos retribusi, salah satunya karena tidak bertepatan dengan pendaftaran kartu penduduk serta penurunan penerimaan retribusi parkir dari target yang telah ditentukan.

Apabila kita melihat angka tren retribusi daerah di Kabupaten dati II Jember yang meningkat tiap tahunnya, maka dimungkinkan sektor ini mempunyai prospek yang cukup baik di tahun-tahun mendatang. Ini terbukti dengan melihat hasil perhitungan Lampiran III dan lampiran VI. Dimana pada tahun 1999/2000 diperkirakan penerimaan retribusi ini sebesar Rp 9.255.709.948,- yang sampai pada tahun 2002/2003 diperkirakan sudah meningkat cukup besar yaitu sebesar Rp11.798.453902,- . Hal ini semua dapat terjadi

apabila pemerintah dapat membaca peluang yang adanya dan mengembangkannya dengan baik.

Mengingat, retribusi ini merupakan faktor yang dominan dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Jember meskipun proporsinya mengalami fluktuasi tetapi penerimaan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, maka pemerintah daerah perlu melakukan usaha-usaha yang menjamin tercapainya target yang telah ditentukan dan selalu meningkat dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerahnya.

Memang manfaat dana yang diserap pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu yang terpenting dan perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor retribusi daerah adalah mencari keseimbangan, dalam arti apabila kebijaksanaan untuk menaikkan tarif retribusi juga pajak pada tingkat tertentu akan membawa manfaat yang lebih tinggi bagi masyarakat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis data hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. proporsi atau sumbangan penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 1993/1994-1998/1999 berfluktuasi antara 54,02 % sampai 48,40%. Proporsi rata-rata penerimaan retribusi daerah per tahun adalah sebesar 54,06%. Kemampuan penerimaan retribusi daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah cukup besar bila dibandingkan dengan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah yang lainnya. Proporsi rata-rata pajak daerah per tahunnya adalah sebesar 29,73% , sedang kan proporsi rata-rata laba perusahaan daerah per tahun adalah sebesar 4,86%. Dengan melihat kenyataan bahwa retribusi daerah memberikan proporsi yang dominan dalam Pendapatan Asli Daerah maka dilihat dari struktur ekonomi, Kabupaten Dati II Jember tergolong lemah atau rendah. Maka untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk dapatnya meningkatkan penerimaan PAD-nya dari sektor-sektor lainnya dalam hal ini misalnya dari sektor pajak atau Laba BUMD yang hal ini lebih mencerminkan struktur ekonomi yang lebih baik pula;
2. penerimaan retribusi daerah di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan selalu mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan retribusi daerah di tahun-tahun mendatang

diperkirakan sebesar Rp 423.790.659,-. Penerimaan retribusi daerah pada tahun anggaran 1999/2000 diperkirakan sebesar Rp 9.255.709.948,- tahun 2000/2001 diperkirakan sebesar Rp 10.103.291.266,- tahun anggaran 2001/2002 sebesar Rp 10.950.872.584,- dan tahun anggaran 2002/2003 sebesar Rp 11.798.453.902,-. Dari data tersebut dapat dijadikan tolak ukur agar target yang direncanakan mendekati kenyataan.

5.2 Saran-saran

Upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. pertumbuhan penerimaan retribusi daerah perlu terus ditingkatkan baik melalui Usaha-usaha yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi. Usaha-usaha intensifikasi yang dapat dilakukan antara lain penyesuaian tarif agar sesuai dengan keadaan ekonomi sekarang, mngefektifkan pemungutan retribusi daerah, penertiban administrasi, pencegahan sedini mungkin terhadap kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi terhadap penerimaan retribusi daerah serta usaha-usaha lainnya yang mendorong peningkatan penerimaan retribusi daerah. Sedangkan Usaha-usaha yang bersifat ekstensifikasi antara lain perluasan obyek retribusi daerah dari yang sudah ada sekarang;
2. karena retribusi mempunyai angka pengganda negatif, maka Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan haruslah memperhatikan faktor-faktor keseimbangan dalam arti usaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah harus memberikan manfaat yang tinggi, atau penurunan dispossible

income sebagai akibat kenaikan retribusi masih dalam batas-batas yang wajar dan tidak mengganggu perekonomian secara umum;

3. meningkatkan penerimaan daerah dengan mengalihkan pada sektor lainnya seperti pajak daerah, laba BUMD atau lainnya yang mencerminkan adanya struktur ekonomi yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA/

- Ano Dajan, 1985, **Pengantar Metode statistik Jilid I**, Jakarta. LP3ES.
- Bintoro, Tjokroamidjojo, 1991, **Pengantar Administrasi Negara**, Surabaya, Erlangga
- Djarwanto PS, 1982, **Statistik Sosial Ekonomi**, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Depdagri, 1999, UU RI No.22 Tahun 1999 tentang **Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah**, Jakarta, Harvarindo.
- Hadi Setia Tunggal, 1999, **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, Jakarta, Harvarindo.
- Hadi Setia Tunggal, 1999, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tanya- Jawab)**, Jakarta, Harvarindo.
- Hamdani Anin, 1982, **Keuangan Negara dan Daerah**, Jakarta, LPFE Universitas Indonesia.
- Irawan, Soetjito, 1990, **Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Munawir S, 1980, **Pokok-Pokok Perpajakan**, Jakarta, Liberty
- Nick Devas, 1989, **Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia**, Jakarta, UI-Press
- Nujaman Arsyad, 1990, **Hubungan Fiskal Antar Pemerintah di Indonesia**, Prisma, Jakarta, LP3ES
- Rochmat Soemitro, 1987, **Azas dan Dasar Perpajakan**, Jakarta, PT. Eresco
- Soetrisno PH, 1982, **Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara**, Yogyakarta, BPFE UGM.

Lampiran. I :

Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Jember Tahun 1993/1994-1998/1999

Tahun Anggaran	PAD (Xi)	Pajak(Yi)	Proporsi (%)	Retribusi Daerah	Proporsi (%)	Labas Bersih Pers. Daerah	Proporsi (%)
1993/1994	6.5690580.093	1.358.851.788	20,68	4.492.022.986	68,38	520.455.000	7,92
1994/1995	8.110.296.839	5.118.865.222	63,97	5.118.865.222	63,12	522.165.000	6,44
1995/1996	10.707.220.059	2.858.947.402	26,70	5.784.151.869	54,02	1.030.600.000	9,63
1996/1997	15.048.072.697	3.459.198.970	22,99	6.124.769.215	40,70	4.237.476.038	2,82
1997/1998	14.017.304.759	3.600.843.506	25,69	6.967.387.104	49,71	1.669.410.332	1,19
1998/1999	20.141.358.584	3.699.583.274	18,37	9.747.855.614	48,40	2.319.427.650	1,15
Proporsi Rata-rata			29,73		54,06		4,86

Lampiran II :

Perhitungan Proporsi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dahi II Jember Tahun Anggaran 1993/1994-1998/1999

1993/1994	$\frac{4.492.022.986}{6.569.580.093}$	X 100% = 68,38%
1994/1995	$\frac{5.118.865.222}{8.110.296.839}$	X 100% = 63,12%
1995/1996	$\frac{5.784.151.869}{10.707.220.059}$	X 100% = 54,02%
1996/1997	$\frac{6.124.769.215}{15.048.072.697}$	X 100% = 40,70%
1997/1998	$\frac{6.967.387.104}{14.017.304.759}$	X 100% = 49,71%
1998/1999	$\frac{9.747.855.614}{20.141.35}$	X 100% = 48,40%

Lampiran III :

Trend Penerimaan Retribusi Daerah Di Kabupaten Dati II Jember Tahun Anggaran 1993/1994-1998/1999 (dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Retribusi Daerah (Yi)	X	YiX	X ²	Y
1993/1994	4.492.022.986	-5	22.460.114.930	25	4.170.222.040
1994/1995	5.118.865.222	-3	15.356.595.666	9	5.017.603.358
1995/1996	5.784.151.869	-1	5.784.151.869	1	5.865.384.676
1996/1997	6.124.769.215	1	6.124.769.215	1	6.712.965.994
1997/1998	6.967.387.104	3	20.902.111.312	9	7.560.547.321
1998/1999	9.241.855.614	5	46.239.278.070	25	8.408.128.630
	37.735.052.010		29.665.346.132		

$$a = \frac{\sum Y_i}{n} = \frac{37.735.052.010}{6} = 6.289.175.335$$

$$b = \frac{\sum Y_i \cdot X}{\sum X^2} = \frac{29.665.346.132}{70} = 423.790.659$$

$$Y' = 6.289.175.335 + 423.790.659X$$

Perhitungan prospek penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 1999/2000-2002/2003 sebagai berikut :

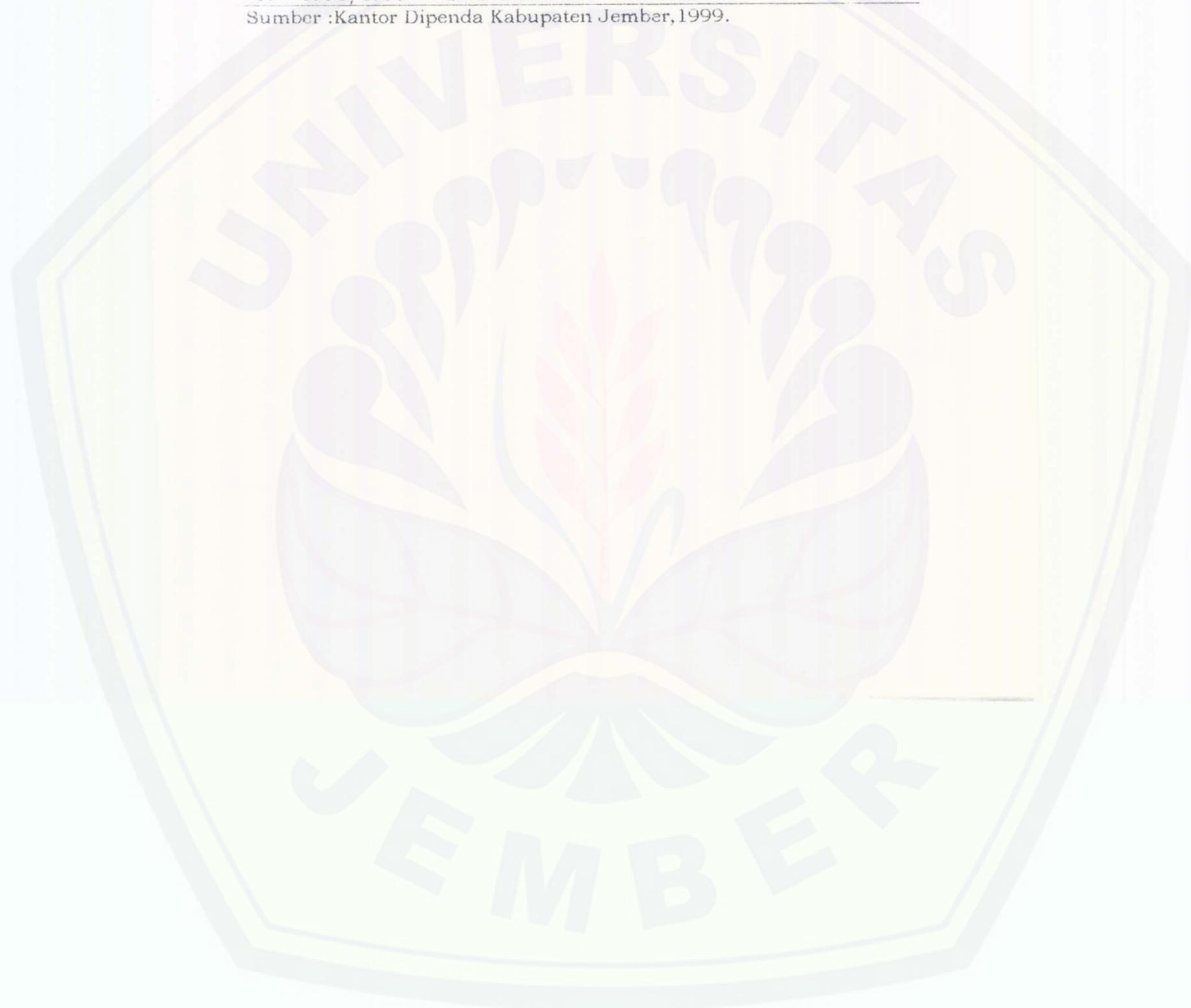
1. Tahun anggaran 1999/2000 :
 $Y' = 6.175.335 + 423.790.659 (7)$
 $Y' = 9.255.709.948$
2. Tahun anggaran 2000/2001 :
 $Y' = 6.289.175.335 + 423.790.659 (9)$
 $Y' = 10.103.291.266$
3. Tahun anggaran 2001/2002 :
 $Y' = 6.289.175.335 + 423.790.659 (11)$
 $Y' = 10.950.872.584$
4. Tahun anggaran 2002/2003 :
 $Y' = 6.289.175.335 + 423.790.659 (13)$
 $Y' = 11.798.453.902$

Lampiran IV :

**Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah di Kabupaten
Dati Il Jember Tahun 1993/1994 -1998/1998 (dalam Rupiah)**

No.	Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1.	1993/1994	6.569.580.093	1.358.851.788	4.492.022.986
2.	1994/1995	8.110.296.839	2.288.180.856	5.118.865.222
3.	1995/1996	10.707.220.059	2.858.947.402	5.784.151.869
4.	1996/1997	15.048.072.697	3.459.198.970	6.124.769.215
5.	1997/1998	14.017.304.759	3.600.843.506	6.967.357.104
6.	1998/1999	20.141.358.584	3.699.583.274	9.747.855.614

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Jember, 1999.

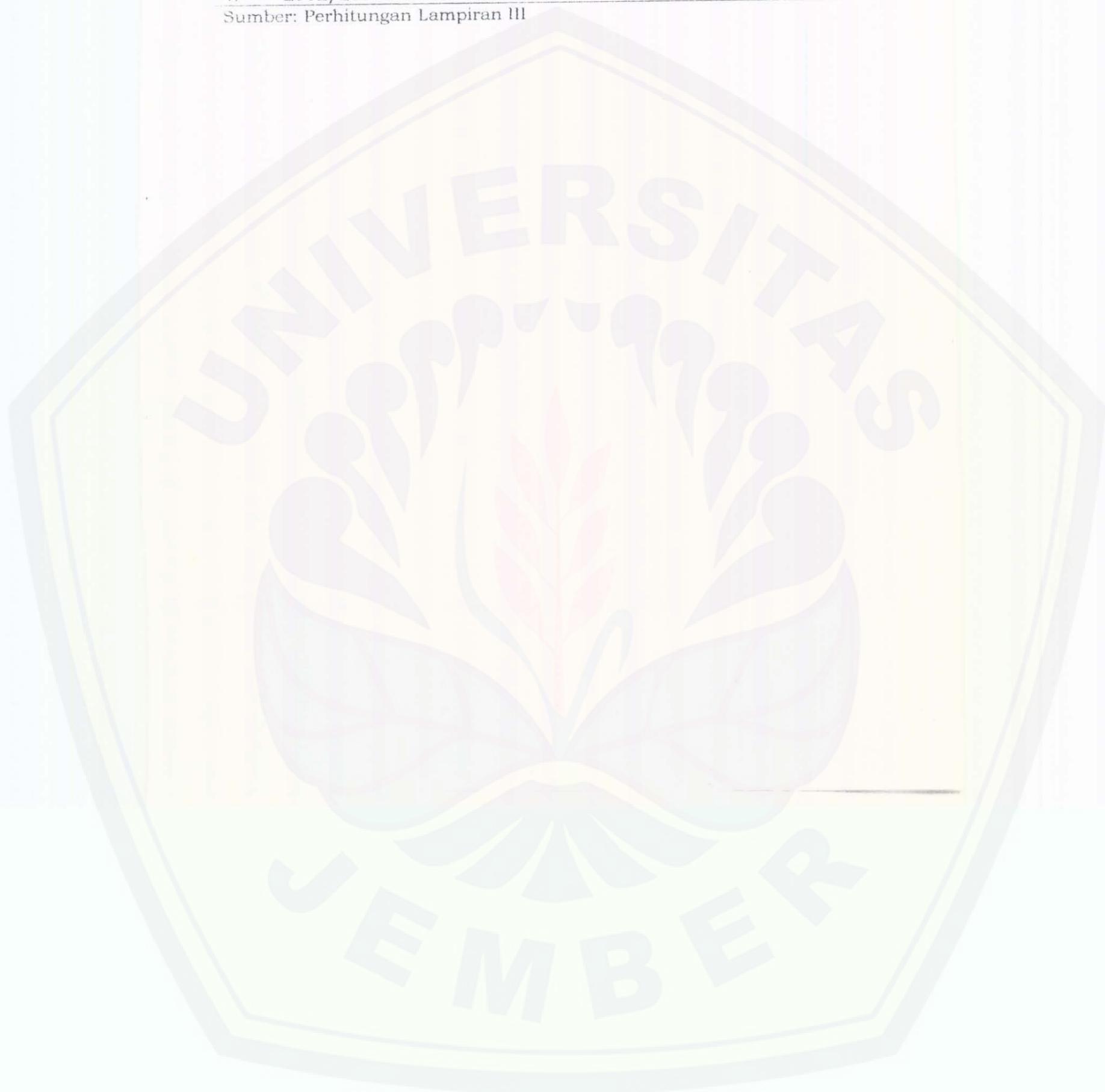


Lampiran V :

**Prospek Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupetn Dati II Jember Tahun
1999/2000 - 2002/2003**

No.	Tahun Anggaran	Prospek Penerimaan Retribusi Daerah
1.	1999/2000	9.255.709.948
2.	2000/2001	10.103.291.266
3.	2001/2002	10.950.872.584
4.	2002/2003	11.798.453.902

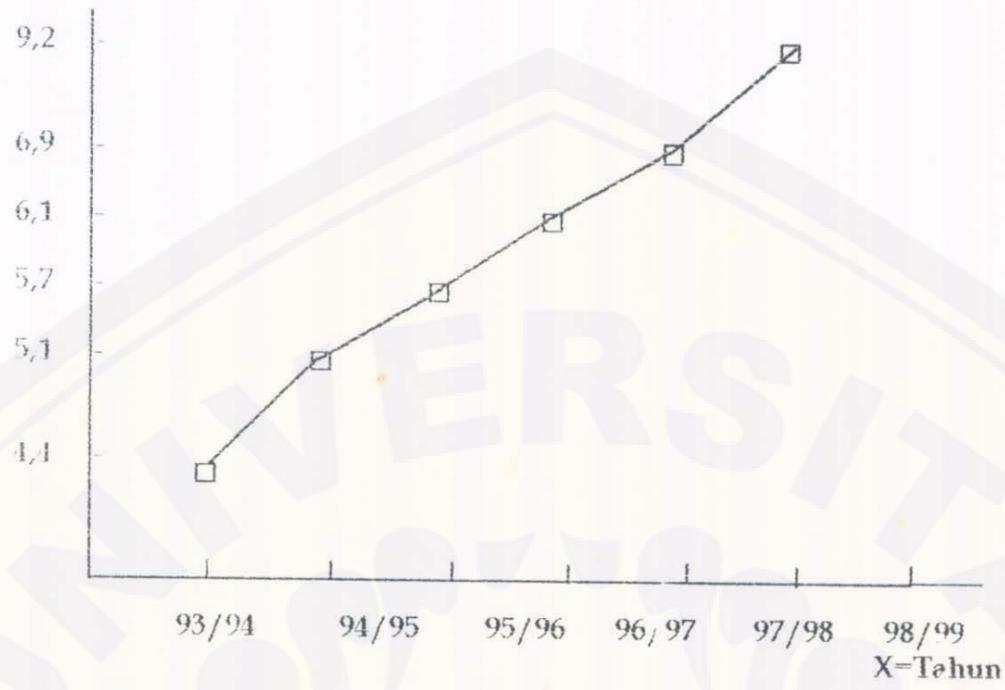
Sumber: Perhitungan Lampiran III



Gambar :

Grafik Trend Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Dati II Jember Tahun Anggaran 1993/1994-1998/1999

Y = Penerimaan Retribusi Daerah (dalam Juta Rupiah)



C. Pinjaman Daerah

D. Lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, daerah dapat menggali sumber-sumber keungan yang tidak dapat terlepas dai kenyataan-kenyataan potensiil yang ada di daerah yang bersangkutan, juga ditentukan pula oleh kondisi dari daerah tersebut.

3.4 Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara (R. Sumitro, 1979;17). Pengertian lain menyatakan bahwa retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomi, karena siapa saja yang tidak menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah, maka tidak akan dikenakan iuran (S. Munawir, 1980:4).

Dari kedua pengertian diatas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

- a) retribusi dipungut oleh negara;
- b) dalam pemungutan terdapat unsur paksaan secara ekonomis;
- c) adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- d) retribusi dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara.